

RINGKASAN EKSEKUTIF
PENCIPTAAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA PADA PROGRAM
PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA KEPULAUAN MOROTAI

Ahmad Junaedi, dkk. junaedi0958@yahoo.co.id

Selama ini ketimpangan pembangunan yang tinggi antar wilayah di Indonesia bagian timur dan bagian barat begitu lebar. Salah satu upaya dalam memperbaiki ketimpangan pembangunan antar wilayah, Pemerintah tengah mempersiapkan pengembangan 10 Destinasi Wisata prioritas dimana salah satunya adalah Kabupaten Kepulauan Morotai. Prioritas pembangunan Pemerintahan saat ini, salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Membangun dari pinggiran salah satunya dimaknai sebagai membangun wilayah Indonesia Timur. Untuk mempercepat pembangunan dan memacu pertumbuhan, Kepulauan Morotai juga ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Implementasi dari kebijakan tersebut akan menciptakan *multiflier effect* baik bagi pertumbuhan ekonomi maupun kesempatan kerja. Untuk mempersiapkan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, maka kajian ini cukup penting untuk dilakukan.

Sebagai tujuan dalam kajian ini adalah Mengetahui gambaran ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja; Mengetahui *employment multiplier effect* yang dapat tercipta dari industri yang tumbuh beserta industri turunannya; Mengetahui pola partisipasi masyarakat dan pola usaha masyarakat yang dapat dikembangkan dalam program entrepreneurship ke depan di Kabupaten Kepulauan Morotai. Kajian ini merupakan kajian kualitatif, dan metode yang digunakan adalah metode survey pada daerah yang telah ditentukan. Pengumpulan data dilakukan melalui *Focus Group Discussion* dan wawancara.

Hasil kajian menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Morotai bergerak lamban namun kecenderungan mengalami pertumbuhan. Sementara, kualitas SDM (angkatan kerja, penduduk yang bekerja) didominasi oleh tingkat pendidikan SD kebawah, sedangkan tingkat pengangguran terbuka didominasi oleh pendidikan SLTA. Adapun berbagai jenis industri/usaha yang diperkirakan tumbuh dan potensial untuk dikembangkan antara lain industri/usaha kerajinan (anyaman, kulit kerang, kulit tempurung, sabut kelapa), makanan/minuman (nata decoco, keripik kulit ikan, ikan asin, abon ikan), transportasi darat (travel, rental mobil, motor becak), transportasi laut (kapal ketingting, speedboat, dsb), perhotelan/resort, restoran/rumah makan, homestay, dsb. Untuk memenuhi tuntutan tersebut beberapa Dinas/SKPD terkait seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), telah melakukan pembinaan kewirausahaan melalui pelatihan baik dalam proses produksi maupun manajemen usaha. Disisi lain juga terlihat adanya partisipasi masyarakat dengan berbagai kegiatan, seperti di daerah/desa wisata (Desa Kolorai) telah membentuk kelompok pemuda yang dilatih sebagai pemandu wisata, membentuk kelompok usaha (kerajinan, makanan/snack, home stay dsb). Untuk Dinas yang membidangi ketenagakerjaan, dalam operasionalnya masih terkendala dengan terbatasnya SDM, dan sarana/prasarana pelatihan. Sehingga program perluasan kesempatan kerja dan pelatihan kerja dalam upaya mengurangi pengangguran, serta merespon rencana pengembangan destinasi wisata belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk memacu pertumbuhan ekonomi adalah dengan menyelesaikan tiga infrastruktur dasar yaitu bandar udara, kelistrikan dan bahan bakar (energi). Sementara dalam upaya mendukung program pengembangan destinasi wisata Morotai, prioritas pelatihan kerja yang mendesak untuk dilaksanakan meliputi kejuruan otomotif (mesin mobil, mesin sepeda motor baik manual/otomatik, dan mesin motor tempel), kejuruan bahasa (Inggris, Jepang, Mandarin, dan Taiwan), kejuruan lainnya : Las, Listrik dan Air Conditioner (AC). Untuk memenuhi kebutuhan pelatihan tersebut, Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan kelembagaan pelatihan (BLK/LLK) yang dapat dikerjasamakan dengan

pihak swasta (Perusahaan, LPS, Universitas,dll) dan Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk menghindari adanya tumpang tindih program/kegiatan antar SKPD, sebaiknya Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan lebih konsentrasi pada kegiatan pelatihan kerja dan mempersiapkan personil (SDM) untuk pembinaan hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan.